

### **BAB III**

## **POLITIK LUAR NEGERI JEPANG PASCA PERANG DUNIA II**

Jepang merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau yang berpenduduk sekitar 128 juta orang dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Menurut mitologi tradisional Jepang didirikan oleh kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM dimana pada saat itu dimulailah mata rantai monarki jepang yang tidak terputus hingga kini. Meskipun, sepanjang sejarahnya, kebanyakan masa kekuatan sebenarnya berada di tangan anggota-anggota istana, shogun, pihak militer, dan memasuki zaman modern, di tangan perdana menteri. Jepang memiliki kekuatan militer yang memadai dan lengkap dengan sistem pertahanan modern.

### **A. Kejatuhan Jepang Pada Perang Dunia II**

Gejolak ekonomi tak terelakkan dari pengaruh depresi dunia yang merupakan imbas dari industri negara-negara kapitalis yang *chaos*. Namun hal ini dapat dipulihkan kembali sejak ditetapkannya Manchuria sebagai “garis hidup Jepang” yang juga merupakan awal dari gerakan militerisme. Frustrasi militer terhadap partai politik yang tidak sanggup menyelesaikan krisis ekonomi mendorong para perwira menengah Angkatan Laut membunuh Perdana Menteri Inukai tsuyoshi. Peristiwa ini dikenal dengan istilah *Go Ichi Go Jiken* (peristiwa 15 Mei 1932). Setelah peristiwa ini, partai politik yang telah berkuasa kembali selama delapan tahun sejak 1924 didepak dari kekuasaan dan sejak itu jabatan perdana menteri dipegang oleh birokrat dan panglima-panglima militer.

Pemerintah militer Jepang percaya bahwa Jepang tidak akan mampu mengalahkan Cina, karena Amerika dan Inggris

mengirimkan bantuan ke Cina melalui Asia Tenggara. Dalam kondisi ini Jepang berencana memutuskan hubungan Inggris dan Amerika dengan cara menduduki Negara-negara Asia Tenggara. Jepang yang meniru Jerman dalam mengeksploitasi bahan baku Negara-negara lain merancang kebijakan ke selatan dalam upaya memperoleh bahan baku di kawasan Asia Tenggara.

Perang Dunia II adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945. Perang ini melibatkan banyak negara yang tergabung dalam Sekutu dan Poros. Perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang dari berbagai pasukan militer. Salah satu dari anggota dari Poros adalah Jepang. Kekaisaran Jepang berusaha mendominasi Asia Timur dan sudah memulai perang dengan Republik Tiongkok pada tahun 1937. Penaklukan Jepang ditandai dengan pada 6 Agustus dan 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 9 Agustus, Uni Soviet melancarkan penyerbuan mendadak ke koloni Jepang di Manchuria (Manchukuo) yang melanggar Pakta Netralitas Soviet-Jepang.

Menyerahnya Jepang pada bulan Agustus 1945 menandai akhir Perang Dunia II. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang secara efektif sudah tidak ada sejak Agustus 1945, sementara invasi Sekutu ke Jepang hanya tinggal waktu. Walaupun keinginan untuk melawan hingga titik penghabisan dinyatakan secara terbuka, pemimpin Jepang dari Dewan Penasihat Militer Jepang secara pribadi memohon Uni Soviet untuk berperan sebagai mediator dalam perjanjian damai dengan syarat-syarat yang menguntungkan Jepang. Sementara itu, Uni Soviet juga bersiap-siap untuk menyerang Jepang dalam usaha memenuhi janji kepada Amerika Serikat dan Inggris di Konferensi Yalta. Isu penyerahan diri Jepang kepada sekutu tertuang dalam Potsdam Declaration (Postdam Declaration| The Birth of The Constitution of Japan) pada tanggal 26 Juli 1945. Kaisar Hirohito menyatakan penyerahan diri Jepang kepada sekutu pada 14 Agustus 1945 (14 August 1945; The Decision of Japan to surrender to the Allies, 2010).

Total kerugian materi yang diderita Jepang begitu besar. Kerusakan akibat bom atom sekutu sangat membahayakan lingkungan mengingat radiasi dari bom atom tersebut.



Gambar 3.1

Tampak kota Hiroshima yang hancur lebur rata dengan tanah

## **B. Politik Luar Negeri Jepang Pasca Perang Dunia II**

Pasca Perang Dunia II Jepang terpaksa juga menyetujui konstitusi pasal 9 tahun 1947 ([Pasal\\_9\\_Konstitusi\\_Jepang](#)) yang menyatakan bahwa Jepang merupakan negara yang cinta damai sehingga tidak diperbolehkan menggunakan perang sebagai instrumen kebijakan luar negerinya serta melarang Jepang untuk memiliki angkatan bersenjata atau militer. Pada tahun 1951 Jepang menandatangani Aliansi keamanan dengan Amerika Serikat yaitu [The US-Japan Treaty Mutual Cooperation and Security](#) ([Treaty\\_of\\_Mutual\\_Cooperation\\_and\\_Security\\_between\\_the\\_United\\_States\\_and\\_Japan](#)) yang mulai berlaku bulan April 1952. Keadaan tersebut menggerakkan hati pemerintah Jepang untuk segera memperbaiki keadaan, yaitu dengan membuat

beberapa kebijakan untuk menjalin kerjasama internasional, antara lain:

#### 1. Yoshida Doctrine

Perdana menteri Jepang pada masa 1946-1954 yaitu Shigeru Yoshida melihat kondisi Jepang sangat terpuruk, baik secara politik dan ekonomi. Secara politik dapat dilihat dari daerah-daerah jajahan Jepang yang lepas, secara ekonomi, terlihat dalam hyperinflasi yang terjadi dari pertengahan tahun 1945 sampai awal tahun 1949. Kemudian muncullah Yoshida Doctrine, yaitu bagaimana Jepang harus bangkit dari keterpurukan dengan membangun kekuatan dalam negeri, dengan memfokuskan kepada pembangunan perekonomian dalam negeri Jepang. Terdapat tiga inti dari Yoshida Doctrine tersebut ( Pyle, 1996), diantaranya:

1. Pemulihan perekonomian dalam negeri Jepang harus menjadi tujuan utama nasional. Dalam hal ini, Kerjasama Ekonomi-Politik dengan Amerika Serikat sangatlah penting.
2. Jepang akan tetap menjadi Negara tanpa militer, dan menghindari keterlibatan dalam isu strategis-politik apapun demi menghindari perpecahan dalam negeri dan menurunnya produktifitas bidang industri.
3. Untuk menjamin keamanan Jepang dalam jangka panjang maka Jepang menyediakan pangkalan bagi Angkatan Laut, Udara, dan Darat Amerika Serikat.

Perbaikan hubungan baik ke negara-negara Asia Tenggara sendiri pada tahun 1950-an dan 1960-an mulai dijalankan melalui perdagangan dan investasi, yang merupakan instrumen yang membantu memulihkan stabilitas Jepang dan juga memperbaiki nama baiknya. Setelah Jepang maju secara ekonomi dengan diberlakukannya “Yoshida Doctrine”, Jepang kemudian mulai memfokuskan diri kepada politik luar negerinya. Pada awal tahun 1970an, timbul sentimen anti-Jepang di kawasan Asia Tenggara. Sentimen tersebut terjadi karena rasa takut akan dominasi ekonomi Jepang yang ditakutkan akan menimbulkan suatu penjajahan model baru yang

berbeda dari penjajahan abad ke-20 dan rasa takut akan militerisme Jepang akibat sejarah pada masa Perang Dunia (PD).

## 2. Fukuda Doctrine

Perdana Menteri (PM) Fukuda Takeo yang menjabat dari tahun 1976-1978 mengimplementasikan dua kebijakan luar negeri yang penting, yaitu: Fukuda Doctrine yang diberlakukan pada tahun 1977 dan penandatanganan perjanjian perdamaian antara Jepang dan China pada tahun 1978. Yang dimaksud dengan Fukuda Doctrine berbeda dengan Yoshida Doctrine sebelumnya, fokus dari Fukuda Doctrine lebih ke *outward-looking*, atau lebih tepatnya memfokuskan politik luar negeri Jepang ke Asia Tenggara. Kemudian dilanjutkan dengan ekspansi bantuan ekonomi di dalam maupun luar kawasan Asia (Trinidad, 2007). Doktrin ini disampaikan PM Fukuda pada pertemuan negara-negara ASEAN di Manila pada tahun 1977, dan tiga inti dari Fukuda Doctrine termuat dalam pidato PM Fukuda, yaitu: pertama, Jepang tidak akan menjadi negara militer, dan akan berkomitmen dalam menjaga perdamaian. Kedua, Jepang bermaksud menjalin hubungan baik dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya berdasarkan asas dari hati ke hati (*heart to heart*). Terakhir, Jepang berniat untuk membantu negara-negara ASEAN dalam membangun hubungan yang baik dengan negara-negara Indochina yang kemudian akan berpengaruh pada perdamaian dan kesejahteraan kawasan Asia Tenggara.

Dalam pengimplementasian Fukuda Doctrine ini, Jepang memang tidak hanya memberikan janji semata, tetapi memberikan aksi-aksi nyata yang membuat Jepang mulai memainkan peran politik yang penting di Asia Tenggara. Seperti keikutsertaan Jepang dalam usahanya menyelesaikan konflik di Indochina, yaitu dengan cara: pertama, mengirimkan 1800 personil tentaranya untuk bergabung dengan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang ditempatkan di daerah konflik. Kedua, Jepang ikut memainkan peran penting sebagai mediator dalam proses penarikan pasukan

Vietnam di Kamboja. Ketiga, Jepang mengajak pemerintah Vietnam untuk berdialog dan menjanjikan sejumlah bantuan ekonomi, asalkan Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja ( Sudō, 1988).

Implementasi dari Fukuda Doctrine ini juga memunculkan hubungan yang erat antara Jepang dan negara-negara ASEAN dengan menjadikan Asia Tenggara fokus dari pemberian Official Development Assistance (ODA) dari Jepang. Komitmen dari Jepang yang termuat dalam Fukuda Doctrine ini menjadi penting dalam melihat Politik Luar Negeri Jepang karena bahkan setelah PM Fukuda tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri di Jepang, doktrin yang dicetuskannya tetap memainkan peran penting dalam politik luar negeri Jepang pada masa Perang Dingin, bahkan pada pasca Perang Dingin pun, hubungan ASEAN dan Jepang semakin erat dengan memperbanyak hubungan dalam segi ekonomi dan sosial-budaya. Fukuda Doctrine ini terbukti menjadi suatu titik penting dalam mengkaji politik luar negeri Jepang, terutama dengan Asia Tenggara.

### 3. Politik Luar Negeri Jepang pasca PM Fukuda Takeo

Perdana Menteri (PM) Zenko Suzuki pada masa pemerintahannya masih mengikuti doktrin Fukuda, hal tersebut dapat dilihat dari kunjungan ke negara-negara ASEAN pada tahun 1981. Zenko Suzuki bahkan mengatakan hal yang sama seperti Fukuda dalam pidatonya di Bangkok yang menekankan pada tiga prinsip sebagai berikut; 1) Jepang tidak akan memainkan peranan militernya di dalam masyarakat dunia, (2) Jepang akan memainkan peranan politiknya untuk ikut menjaga upaya perdamaian dunia, (3) Jepang akan menekankan perbaikan ekonomi dalam tiga hal yaitu kerjasama ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan ekonomi mikro (Sueno , 2002).

Pada tahun 1983, Jepang melakukan kunjungan ke ASEAN dengan perwakilan PM Yasihuro Nakasone dengan tujuan untuk meningkatkan 50% produk industri Jepang di negara-negara ASEAN, dan program

dukungan serta bantuan kepada negara-negara ASEAN untuk melakukan perbaikan dan renovasi di berbagai sektor. Dalam sektor ilmu pengetahuan dan teknologi, Jepang juga mengundang pemuda-pemuda dari ASEAN untuk datang mengunjungi Jepang setiap tahunnya untuk memperkenalkan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan negara-negara ASEAN.

Pada tahun 1987, Jepang mengalami pergantian PM yaitu Noboru Takeshita. Dalam pemerintahannya Takeshita juga masih berusaha menjalin hubungan baik dengan ASEAN, hal ini dapat terlihat dari judul pidato yang disampaikan Takeshita yaitu “Japan and ASEAN a new partnership toward peace and prosperity” (Sueno , 2002). Takeshita berkonsentrasi kepada tiga prinsip dasar yaitu; untuk memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara-negara ASEAN, kerjasama politik dengan negara-negara ASEAN, dan mempromosikan pertukaran budaya. Diplomasi Jepang dengan negara-negara ASEAN tetap berlanjut pada pemerintahan Jepang selanjutnya yaitu yang dipimpin oleh PM Toshiki Kaifu, Kaifu mengatakan pada pidatonya dalam kunjungannya ke negara-negara ASEAN pada tahun 1991 di Singapura bahwa betapa pentingnya menjalin hubungan dengan ASEAN berikut adalah kutipan dari pernyataannya;

*”I believe that Japan and ASEAN are becoming mature partners able to look seriously at what we can do for Asia-Pacific peace and prosperity and to think and act together for our shared goals. building upon the long years of dialogue between Japan and ASEAN, we are now able to speak frankly to each other in both of economic and political spheres. Along with continuing to work to create a climate conducive to candid dialogue in all areas, I intend to make a concreted effort for greater cooperation in all fields (Sueno , 2002).”*

Kaifu, menekankan bahwa yang menjadi bagian penting dari kebijakan luar negeri Jepang saat ini adalah Jepang akan selalu berupaya untuk memainkan

peranannya untuk ikut serta dalam menjaga perdamaian dan perkembangan ekonomi. Segera setelah kunjungan dari Perdana Menteri Kaifu, kaisar Akihito melakukan kunjungan diplomatiknya secara hati-hati ke negara-negara ASEAN yang dipilih secara selektif yaitu ke Thailand, Malaysia dan Indonesia. Yang dalam kunjungannya kaisar menegaskan bahwa Jepang adalah negara "cinta damai" yang tidak akan pernah mengulang kembali cerita horor seperti pada masa Perang Dunia berlangsung. Pada akhirnya kunjungan tersebut merupakan sebuah momentum awal terjalannya rasa kepercayaan dari negara-negara ASEAN untuk menjalin hubungan yang erat sebagai mitra dalam berbagai bidang dengan Jepang.

Kemudian Perdana Menteri Kiichi Miyazawa (1991), juga berupaya untuk menjaga hubungan internasional Jepang dengan negara-negara ASEAN, dengan melakukan kunjungan kenegaraan pada tahun 1993 ke Bangkok. Dalam kebijakan luar negerinya Miyazawa menekankan 4 point penting yaitu;

1. Mempromosikan dialog politik dan keamanan antara negara-negara Kawasan ASEAN sebagai upaya memperkuat stabilitas keamanan dan perdamaian di Asia Pasifik, dan untuk memikirkan secara serius mengenai visi dari masa depan keamanan di kawasan Asia-Pasifik.
2. Melanjutkan upaya untuk meningkatkan perekonomian negara-negara kawasan Asia Pasifik, dan mempromosikan perkembangan ekonomi yang dinamik.
3. Berupaya secara aktif untuk terus memperjuangkan hak-hak kemanusiaan sebagai bentuk demokrasi.
4. Kerjasama Jepang-ASEAN untuk mengupayakan keamanan dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik, dengan terus mengupayakan pengembangan strategi.

Puncaknya yaitu pada tahun 1997, pada masa Perdana Menteri Ryutaro Hashimoto mengajukan bentuk baru dari hubungan antara Jepang dengan negara-negara ASEAN. Lebih jauh dalam pidatonya di Singapura Hashimoto mengungkapkan, "perlunya perubahan dan reformasi dalam menjalin hubungan yang lebih luas dan lebih dalam



lagi antara Jepang dan ASEAN, Hashimoto juga mengingatkan ketika dahulu pendahulunya pernah mencanangkan ”doktrin Fukuda”, yang kemudian dilanjutkan dengan ”doktrin Takeshita”, maka kini saatnya saya akan menawarkan hal yang baru untuk kelangsungan hubungan Jepang dan ASEAN (Sueno , 2002). Hashimoto berhasil merombak dengan meluncurkan program reformasi yang poin utamanya adaalah independensi Bank of Japan, deregulasi sistem valuta asing, dan desegmentasi industri asuransi.

### **C. Kemajuan Jepang Pasca Perang Dunia II**

Bangsa Jepang merupakan bangsa yang tidak mudah menyerah. Dari segi budaya, mereka menerapkan sistem kerja kolektif dan bukan merupakan bangsa yang senang meniru. Mereka selalu berusaha belajar dari kemajuan dan kesalahan bangsa lain tanpa harus mencontoh seutuhnya. Seorang ilmuwan di Jepang benar-benar memiliki andil yang sangat besar dalam proses pembangunan bangsa. Pemimpin-pemimpin Jepang menyadari bahwa bangsa Barat mempunyai kelebihan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kelebihan itu mereka berhasil menguasai Cina dan beberapa negara di Asia. Untuk menghindari hal itu, Jepang harus menyamai bangsa barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjadikan negaranya sebagai negara industri maju. Ketika para ilmuwan Jepang belajar teknologi maupun perekonomian di Amerika maupun negara Eropa, saat studi tersebut selesai, mereka akan dengan bangga kembali ke tanah airnya dan menerapkan apa yang didapat dengan beberapa modifikasi keunikan sistem sosial dan sistem budaya yang mereka miliki. Bagi ilmuwan Jepang teori ekonomi barat hanya dianggap sebagai “bahan baku.” dan bukan alat yang langsung bisa dipakai. Para perencana ekonomi

Jepang tidak pernah percaya bahwa untuk menjadi negara maju, nilai-nilai tradisionil harus dipinggirkan seperti yang terjadi di Barat. Mereka sangat percaya bahwa nilai-nilai tradisional justru harus dipertahankan sebagai penyeimbang.

Itulah kenapa bangsa Jepang dapat tumbuh pesat secara perekonomian namun masih dengan ciri negara Timur yang khas. Life-time employment, seniority based system, dan traditional family system adalah contoh-contoh nilai dan institusi tradisional Jepang yang masih terpelihara hingga sekarang.

Dari tinjauan mikro, salah satu aspek yang mendorong keberhasilan Jepang dalam membangun sumberdaya manusia paska Perang Dunia II adalah membudayakan sistem “Kerja Kelompok” (Team work). Yaitu suatu sistem, seperti yang telah dijelaskan di sub bab sebelumnya, yang mana para insinyur Jepang yang dikirim ke Barat untuk belajar harus kembali ke Jepang dengan membawa ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, ilmu dan teknologi yang mereka bawa harus diajarkan kepada semua anggota kelompoknya. Sedangkan dilihat dari aspek makro pembangunan, Jepang memprioritaskan kebijakan pemerataan pembangunan. Diantara Negara-negara maju, Jepang adalah negara yang paling tinggi tingkat pemerataan hasil-hasil pembangunannya. Bukan hanya dari aspek pendapatan tetapi juga meliputi fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur-fisik, dan lain-lain. Rakyat Jepang masa sekarang sudah menikmati fasilitas – fasilitas tersebut. Bahkan untuk daerah pedesaan di pegunungan, mereka mendapatkan fasilitas jalan, air minum dan listrik kurang lebih seperti di Tokyo, Kyoto, Osaka dan kota-kota besar lainnya.

Belajar dari kegagalan negara lain, pemerintah Jepang giat mengkonsolidasikan sumberdaya domestik dan mendorong perusahaan-perusahaan lokal untuk menjadi mitra pemerintah dalam membangun dan memajukan perekonomian nasional serta membantu dan memfasilitasi masyarakatnya menjadi pengusaha-pengusaha baru. Dengan mengefektifkan sumberdaya-sumberdaya baru tersebut, Seperti kita ketahui bersama kemajuan industri Jepang sekarang merupakan buah dari kerja keras mereka ketika membangun pondasi industri. Jepang memulai revolusi industrinya sebagai kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemulihan ekonomi sudah berjalan cukup jauh sehingga memungkinkan industrinya memasok banyak peralatann selain dari senjata. Jepang bersikeras untuk secara luas mengembangkan sektor-sektor teknologi tinggi yang berkaitan erat dengan kemampuan medan pertempuran pada era pasca perang dingin. Beberapa bidang teknologi yang berkaitan atau akan dikaitkan dengan mesin perang. Teknologi-teknologi ini dalam peranan di sipil telah melahirkan kamera, robot, televisi, mesin potocopy, dan industri sirkuit terpadu kelas dunia. Produk-produk ini telah merajai pasar dunia karena kecanggihan teknologi. Ekonomi dunia sedang berada di periode pertumbuhan yang cepat. Jepang yang memiliki pasar dalam negeri yang berkembang pesat, pemerintah yang siap mengucurkan modal dan penduduk yang memiliki kecenderungan menabung uang yang tinggi berada pada posisi untuk meraih manfaat dari perekonomian dunia tersebut. Pada tahun 1960 laju ekonomi Jepang mencapai 13,2 persen, laju pertumbuhan ini terus dipertahankan selama sepuluh tahun berikutnya selain itu juga bermunculan beberapa partai politik.

Pada akhir 1960-an Jepang telah menjadi partner perdagangan yang pertama atau setidaknya yang kedua terbesar dari hampir setiap Negara komunis atau kapitalis, di Asia Timur dan Tenggara serta Pasifik Barat. Kekuatan ekonomis berkembang sejajar dengan prestasi – prestasi, yang bisa dibandingkan tetapi kurang dapat diukur, dalam bidang social dan kebudayaan. Secara budaya jepang juga dalam kondisi ledakan kreativitas yang tinggi dan vitalitas yang luar biasa dalam sastra, seni, dan music.

Lingkungan internasional yang dihadapi Jepang juga mulai melembut suasananya, dengan hilangnya perang dingin secara berangsur – angsur dan tumbuhnya semangat détente dalam awal tahun 1970-an antara Amerika Serikat dan Negara – Negara komunis. Namun sukses jepang sesungguhnya menyebabkan timbulnya seperangkat soal yang seluruhnya baru. Sejak menjadi *superpower* industry, Jepang juga mengetahui behwa negara – negara lain mengharapkan yang lebih banyak lagi. Negara – Negara yang sedang berkembang, terutama negara–negara di Asia Timur dan Tenggara meminta

perlakuan yang lebih ramah dalam perdagangan dan bantuan ketimbang yang telah diberikan oleh Jepang yang dimaksudkan guna pertumbuhan ekonominya sendiri di masa lalu kepada mereka.

Dalam perkembangannya Jepang merupakan negara pertama Asia yang mampu bersaing dengan negara barat yang nota bene adalah kampiun dalam deretan Negara maju. Segala bidang di Jepang tumbuh menjadi industry-industry yang hasil produknnya menjamah di seluruh dunia. Takeshi Inoguchi dalam bukunya (Inoguchi, 1991) mengatakan bahwa, setelah Perang Dunia II berakhir, Jepang telah mengalami beberapa tahap perkembangan pada karakter politik luar negerinya, antara lain:

- a. *Leaders*, yaitu dimana Jepang menjalankan kebijakan luar negeri dengan berusaha menjadi pemimpin di kawasan Asia, yang bertujuan untuk menjadi pemimpin dunia.
- b. *Dependency*, yaitu masa pendudukan Jepang oleh Amerika Serikat pasca kekalahannya pada Perang Dunia Iiyang menghasilkan beberapa kerjasama dengan AS, sehingga Jepang menjalankandiplomasi aliansi dengan AS khususnya dalam kemiliteran.
- c. *Free rider's*, merupakan masa dimana Jepang mulai menjalankan kebijakannya dengan memberikan perhatian penuh terhadap upaya peningkatan ekonominya untuk memperbaiki keadaan negaranya yang kalah pad aPerang Dunia II, dan Jepang berupaya seminimal mungkin menghindari resiko yang mengundang pertentangan baik dari dalam maupun dalam hubungan luar negerinya.
- d. *Supporter*, dimana Jepang mulai memainkan peranan yang penting dalam hubungan multilateralnyadan mulai ikut mendukungsegala upaya yang dilakukan PBB, untuk memperkuat perannya di mata internasional.

